

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### 1. Manajemen Kas

###### a. Pengertian Manajemen Kas

Manajemen Kas adalah Pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi (Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 5). Manajemen Kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Mike Williams (dalam Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 5) Manajemen Kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor lain. Pendapat lain menurut Storkey (dalam Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 5) mendefinisikan Manajemen Kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien.

Menurut Andie Megantara *et al* (2006 : 24) Manajemen Kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Manajemen Kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berfungsi

dengan baik. Penggunaan kas atas sumber daya likuid yang dimiliki oleh organisasi harus dilakukan seoptimal mungkin.

b. Tujuan Manajemen Kas

Dengan adanya Manajemen Kas yang baik, suatu pemerintahan dapat mendanai pengeluaran-pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajiban ketika jatuh tempo. Tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko dan efisiensi. Secara khusus, Williams (dalam Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 6) menyatakan tujuan-tujuan dari Manajemen Kas pemerintah yang efisien adalah:

- 1) Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan.
- 2) Mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.
- 3) Menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah.
- 4) Mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya.

Andie Megantara *et al* (2006 : 25) menyatakan bahwa dalam Manajemen Kas terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- 1) Manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui berapa besar penerimaan negara yang akan masuk dalam rekening kas negara dan berapa besar pengeluaran yang akan dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain berupa kegiatan *monitoring* penerimaan dan pengeluaran kas negara; dan penyiapan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan/kelebihan kas. Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda atau dipercepat, oleh karenanya pemerintah harus mampu melihat kapan saat pengeluaran kas yang menguntungkan pemerintah. Dalam hal kegiatan penerimaan kas, pemerintah perlu menetapkan aturan tentang penyetoran seluruh penerimaan sesegera mungkin ke dalam rekening pemerintah yang telah ditetapkan. Penerimaan negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya pemerintah. Demikian pula dengan kemungkinan terjadinya kekurangan/kelebihan kas, pemerintah harus mampu menyiapkan langkah-langkah pengantisipasi karena kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah akibat adanya *time value of money*.
- 2) Meminimalisasi kas menganggur (*idle cash*). Selayaknya, pemanfaatan kas secara maksimal ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

(*yield*). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku. Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat berupa saham, surat hutang, dan investasi langsung (pasal 41). Kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kas menganggur adalah pembelian kembali (*buy back*) Surat Hutang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah. Pembelian kembali ini akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah (*cost of financing*). Bahkan bila pemerintah mempunyai manajemen kas yang baik, maka sesungguhnya pemerintah dapat melakukan penundaan penerbitan SUN. Pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan dapat dibiayai dengan menggunakan kas yang berasal dari pendapatan yang ada.

- 3) Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Banyaknya rekening pemerintah (*bank accounts*) yang tersebar di berbagai bank menimbulkan biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebaranya rekening mengakibatkan semakin banyaknya kas menganggur (*Idle Cash*). Untuk itu perlu dilakukan pengurangan jumlah rekening pemerintah dengan menerapkan sistem rekening tunggal (*single account system*). Manajemen kas perlu merestrukturisasi cara-cara

pengumpulan pendapatan pemerintah (misalnya *banking arrangement* mengenai saat penyetoran oleh bank persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada bank persepsi). Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara dapat masuk ke rekening kas umum negara sesegera mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Demikian pula dengan pemrosesan pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu dilakukan dengan seefisien dan secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain yang didapatkan adalah pengurangan terjadinya penyelewengan terhadap keuangan negara.

c. Fungsi Manajemen Kas

Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 6) menyatakan bahwa fungsi Manajemen Kas antara lain:

- 1) Mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya merupakan kerugian (*lost opportunity*). Dana-dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada (dan pengurangan arus kas keluar dari Perbendaharaan untuk pembayaran bunga) atau dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening Perbendaharaan. Minimalisasi atas saldo kas menganggur memerlukan informasi yang akurat atas perkiraan pendapatan dan kemungkinan pengeluaran.

- 2) Mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang (tagihan kepada pihak lain). Kas mudah dikonversi dengan segera menjadi sesuatu yang berharga atau barang. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa depan, sering kali mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi (menunggak) atau mengalami penurunan nilai. Segera setelah penerimaan (piutang) jatuh tempo kepada pemerintah, penerimaan tersebut harus segera direalisasikan dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke rekening Perbendaharaan.
- 3) Membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini, tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Untuk pembayaran-pembayaran lain, seperti pembayaran kepada rekanan, keputusan kapan membayar mungkin dilakukan. Rekanan pemerintah juga menghadapi kebutuhan manajemen kas yang sama dengan pemerintah. Mereka ingin mempercepat penerimaan kas. Salah satu caranya adalah memberikan potongan pembayaran apabila pembayaran atas barang yang dijual dilakukan tepat pada waktunya.

Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional penting karena sumber daya keuangan yang terbatas sehingga dibutuhkan kegiatan perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan

ini untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi.

d. Faktor yang memengaruhi Manajemen Kas

Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 7) terdapat beberapa hal yang memengaruhi Manajemen Kas antara lain:

- 1) Ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan (atau untuk meminimalisasi biaya) akan pinjaman jangka pendek.
- 2) Proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan.
- 3) Perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo.
- 4) Efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses Manajemen Kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah.
- 5) Manajemen posisi-posisi risiko terkonsolidasi
- 6) Integrasi Manajemen Kas dengan manajemen hutang

Adanya pemisahan fungsi pengelolaan kas, yaitu pemisahan fungsi penerimaan, fungsi pencatatan, fungsi pengeluaran dan fungsi

penyimpanan merupakan faktor yang memengaruhi Manajemen Kas selain faktor-faktor yang memengaruhi Manajemen Kas.

e. Unsur-unsur Manajemen Kas

Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 9) Manajemen Kas sektor publik meliputi empat unsur-unsur yang setiap elemen-elemennya harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektivitas Manajemen Kas antara lain:.

1) Perencanaan (*Forecasting*)

Perencanaan pada dasarnya adalah proses memperkirakan kemungkinan dampak terbesar yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan pengetahuan tentang kondisi sekarang yang memengaruhi kejadian di masa mendatang tersebut (Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 9). Menurut Hartley (dalam Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 9) menyatakan

*A forecast is no more than someone's belief in the future based upon certain assumptions that have been made regarding future events. If the assumptions subsequently prove to be wrong, then the forecast will not prove to be right either. For this reason, it is necessary to set down formally the key assumptions on which major parts of the forecast are based.*

Dalam konteks Manajemen Kas, tujuan utamanya adalah dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi. Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 10) menyatakan tujuan perencanaan kas yang baik adalah:

a) Mencegah kebangkrutan.



- b) Mencegah kesalahan yang menimbulkan biaya yang besar.
  - c) Membantu dalam mengendalikan biaya pendanaan.
  - d) Meningkatkan kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman kepada organisasi.
  - e) Meningkatkan penggunaan dana.
- 2) Manajemen arus kas (*mobilising and managing the cash flow*)

Mobilisasi kas meliputi dari dua area fungsi yaitu percepatan piutang dan pengendalian pengeluaran. Secara umum, Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 11) menyatakan suatu perusahaan disarankan untuk memberikan penekanan pada empat tujuan dalam transaksi keuangan harian, yaitu:

- a) Mempercepat penagihan
  - b) Mengendalikan hutang
  - c) Mengendalikan saldo bank
  - d) Investasi kelebihan kas
- 3) Mengendalikan saldo bank

Memberikan pengendalian yang ketat pada saldo bank menjadi sangat populer sebagai salah satu prinsip dalam Manajemen Kas. Organisasi menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk membiayai biaya operasional atau untuk saldo kompensasi (*compesating balance*) harus diinvestasikan ke dalam surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga. Konsekuensinya adalah organisasi tersebut harus berusaha untuk menghindari akumulasi kas

yang tidak aktif pada rekening mereka dengan menggunakan laporan kas harian dan atau membuat pembayaran dengan menggunakan *draft*.

#### 4) Investasi Kelebihan Kas

Kas di tangan (*cash on hand*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi pemerintah didorong untuk menggunakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi dan mudah diubah menjadi kas baik melalui pasar modal maupun karena jatuh tempo.

Unsur-unsur Manajemen Kas menurut Indriyo Gitosudarmo (2002 : 65) terdiri dari tiga elemen antara antara lain:

##### 1) Perencanaan (*forecasting*)

Yang dimaksud dengan perencanaan kas atau *budget* kas yaitu perkiraan atau estimasi posisi kas pada suatu saat tertentu dalam suatu periode tertentu yang akan datang. Tujuan perencanaan kas adalah:

- a) Untuk mengetahui kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaannya.
- b) Untuk mengetahui adanya saldo kas defisit (kekurangan) kas dari rencana operasi dan non operasional.
- c) Untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas.

- d) Untuk mengetahui saat-saat dana itu diinvestasikan pada kegiatan lain bila ternyata terjadi saldo kas yang relatif tinggi.
  - e) Sebagai penentuan saat-saat kredit kepada lembaga-lembaga keuangan.
  - f) Sebagai dasar permintaan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan.
  - g) Sebagai dasar dalam pengendalian atau pengawasan posisi kas yang sedang berjalan.
- 2) Pengendalian Kas

Menahan uang sebenarnya menanggung biaya (*cost*). Dengan konsep *oppurtunity cost* maka biaya menahan uang adalah berupa laba yang sebenarnya dapat diperoleh apabila dana tersebut digunakan untuk penggunaan untuk investasi. Menahan uang muka yang berlebihan menunjukkan adanya Manajemen Kas yang baik. Pengendalian uang tunai dan setengah tunai didasarkan pada ramalan jangka pendek atas kebutuhan uang tunai, ramalan ini akan membantu menemukan kebutuhan minimum dan maksimum akan uang tunai. Ramalan ini akan membantu menemukan kebutuhan minimum dan maksimum akan uang tunai selama periode tertentu.

Kebijakan manajemen harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan optimal antara faktor-faktor tingkat kebutuhan uang tunai dengan memasukkan sikap mau menanggung risiko. Pokok permasalahannya adalah bahwa keputusan yang tepat tidak diketahui

dan didasarkan atas pengetahuan itu, disusun suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang sudah ditentukan dalam batas-batas biaya atau risiko yang sudah diketahui. Siasat ini kemudian dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran uang tunai, untuk mengendalikan peredaran uang tunai dan untuk mengadakan tindakan korektif.

### 3) Pengelolaan Saldo Kas

Tujuan dasar dari pengelolaan kas adalah untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila aliran kas masuk (*cash flow*) lebih besar dari aliran kas keluar (*cash outflow*) pada suatu saat tertentu maka akan terjadi saldo kas (*proceeds*) dan sebaliknya bila aliran kas masuk lebih kecil dari aliran kas keluar pada suatu saat tertentu maka akan terjadi defisit (kekurangan kas).

unsur diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan porsinya dengan optimal. Upaya pengoptimalan unsur-unsur yang ada diharapkan dapat tercapainya Manajemen Kas yang baik.

#### f. Pengukuran Manajemen Kas dinilai berdasarkan Perencanaan Kas dan Remunerasi

Terdapat dua hal yang dapat menentukan Manajemen Kas baik atau tidaknya berdasarkan:

##### 1) Perencanaan Kas (*Forecasting*)

Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat penting adanya perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Pada dasarnya Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Andie Megantara *et al*, 2006 : 296). Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dioptimalisasi melalui penempatan uang pada bank sentral maupun dipergunakan untuk kegiatan investasi sehingga menjadikan Manajemen Kas yang optimal sebagaimana diatur pada pasal 7 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## 2) Remunerasi

Salah satu bagian penting dalam Manajemen Kas adalah pemanfaatan saldo kas yang menganggur (*Idle Cash*) sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi pemerintah. Melalui keputusan yang telah ditanda tangani antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia, disepakati bahwa Bank Indonesia akan memberikan Remunerasi (imbalan) sebesar 65% dari *BI rate* atas saldo kas negara pada rekening bank sentral. *BI Rate* adalah kebijakan keuangan yang ditetapkan BI setiap bulan didahului rapat anggota dewan gubernur dengan melihat kondisi perekonomian di dalam dan

luar negeri secara keseluruhan. Remunerasi atas saldo uang negara tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 17/KMK.05/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 113/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009 sehingga didapatkan adanya tambahan penerimaan bagi pemerintah atas penempatan uang di Bank Indonesia.

## 2. *Treasury Single Account*

### a. Pengertian *Treasury Single Account*

*Treasury Single Account* merupakan rekening tunggal pemerintah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan negara dikelola dalam satu rekening yaitu RKUN di Bank Indonesia. Andie Megantara *et al* (2006 : 39) Rekening tunggal pemerintah merupakan suatu rekening yang berada pada bank sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua penerimaan negara dan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (pasal 12 ayat 2).
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara (Pasal 22 ayat 2).

3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank sentral (pasal 22 ayat 3).

b. Latar belakang *Treasury Single Account*

Rahmadi Murwanto *et al* (2006 : 225) menyatakan beberapa penyebab perlunya *Treasury Single Account* dalam Manajemen Kas adalah:

1) Rekening penerimaan atau pengeluaran pemerintah tersebar di banyak bank umum

Selama ini uang negara tersimpan di Bank Indonesia dan di bank umum. Uang negara yang tersimpan di bank umum sebagian merupakan penyediaan dana di bank operasional untuk membiayai pengeluaran negara yang dilaksanakan melalui KPPN di seluruh Indonesia (172 KPPN). Sebagian yang lain merupakan penerimaan negara yang terkumpul di rekening-rekening bank persepsi yang belum dilimpahkan ke rekening Bendahara Umum Negara setiap hari Selasa dan Jumat. Tersebarinya rekening pemerintah di berbagai bank umum menyulitkan pemerintah untuk mengetahui jumlah uang yang masuk yang berasal dari penerimaan dan jumlah pengeluaran uang serta saldo uang secara cepat. Hal ini berakibat pada sulitnya dilakukan perencanaan kas yang baik. Banyaknya rekening juga berdampak pada inefisiensi karena:

a) Tingginya biaya pengelolaan rekening

- b) Pengendapan uang pemerintah yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran pada bank umum menyebabkan tingginya *opportunity cost*.
- 2) Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh Departemen/lembaga

Masih terdapat uang negara yang berada dalam penguasaan departemen yang juga disimpan dalam rekening-rekening di bank umum, berupa penerimaan negara yang sementara belum disetor ke kas negara dan uang persediaan yang berasal dari APBN untuk membiayai pengeluaran operasional departemen/lembaga.

- 3) Uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening.

Selain di bank umum, pemerintah juga memiliki uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening. Banyaknya rekening tersebut mengakibatkan sulit untuk mengetahui saldo rekening pemerintah dan *monitoring* dana yang keluar/masuk rekening tersebut.

c. Tujuan *Treasury Single Account*

Tujuan pelaksanaan *Treasury Single Account* menurut Abdul Gofar (dalam Setianingtias, 2011 : 29) mencakup antara lain:

- 1) Adanya pengendalian atas saldo kas dan aliran kas

Untuk pengendalian saldo kas dan aliran kas diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mewajibkan penerimaan dan pengeluaran



harus melalui rekening tersebut sehingga dengan demikian saldo kas dapat dikendalikan.

- 2) Saldo kas setiap hari harus dikonsolidasikan ke rekening *Treasury Single Account*

Semua saldo kas yang tersebar dibanyak rekening, untuk keperluan operasional pemerintah maka saldo tersebut harus dikonsolidasikan ke dalam satu rekening pada setiap akhir hari kerja.

- 3) Minimalisasi *Idle Cash*

*Idle Cash* adalah uang yang mengendap atau menganggur pada bank berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan. Uang yang menganggur tersebut harus dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dana kas sedemikian rupa sehingga saldo kas menganggur menjadi minimal.

- d. Mekanisme pelaksanaan *Treasury Single Account* rekening pengeluaran

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran dalam rangka penerapan *Treasury Single Account*, mekanisme pelaksanaan *Treasury Single Account* rekening pengeluaran dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam rangka penerapan *Treasury Single Account*, mekanisme pelaksanaan *Treasury Single Account* dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyaluran Dana melalui Bank Operasional Mitra Kerja KPPN dalam pasal yang menyatakan setiap akhir hari kerja semua saldo dalam rekening pengeluaran harus dilimpahkan ke *Treasury Single Account*.

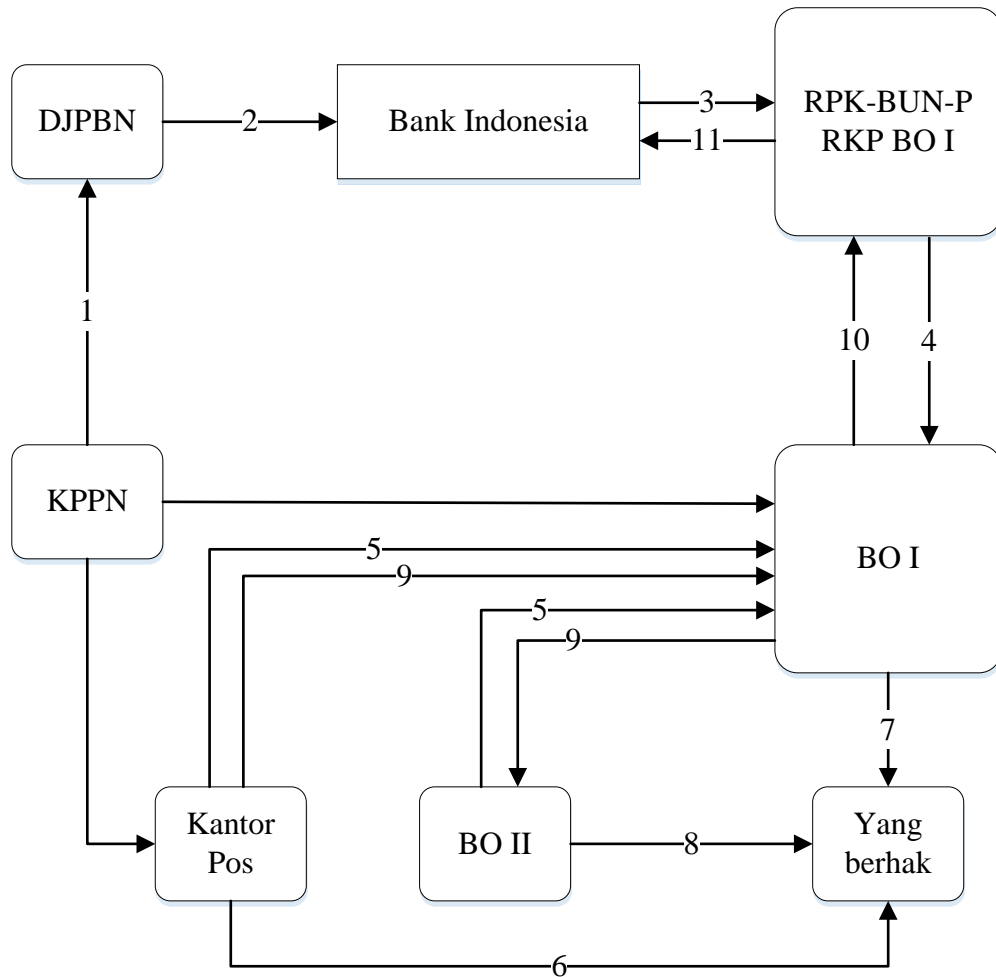
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada setiap harinya menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya ke Direktorat pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Perkiraan kebutuhan dana tersebut mencakup kebutuhan dana dalam rangka pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk kebutuhan dana untuk pencairan SP2D yang dikembalikan BO I. Penyampaian kebutuhan dana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara menggunakan Program *e-kirana* pada tahun 2007 dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tahun 2010.

Penjelasan Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan *Treasury Single Account* rekening pengeluaran sebagai berikut:

- 1) KPPN setiap harinya menyampaikan rencana kebutuhan dana untuk pengeluaran hari berikutnya ke Kantor Pusat Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap harinya meminta Bank Indonesia untuk menyediakan dana pada Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P) guna memenuhi

kebutuhan dana untuk pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh KPPN sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

- 3) RPK-BUN-P menerima pengisian dana dari Bank Indonesia pada awal hari kerja.



Gambar 2.1  
Mekanisme Pelaksanaan TSA Rekening Pengeluaran

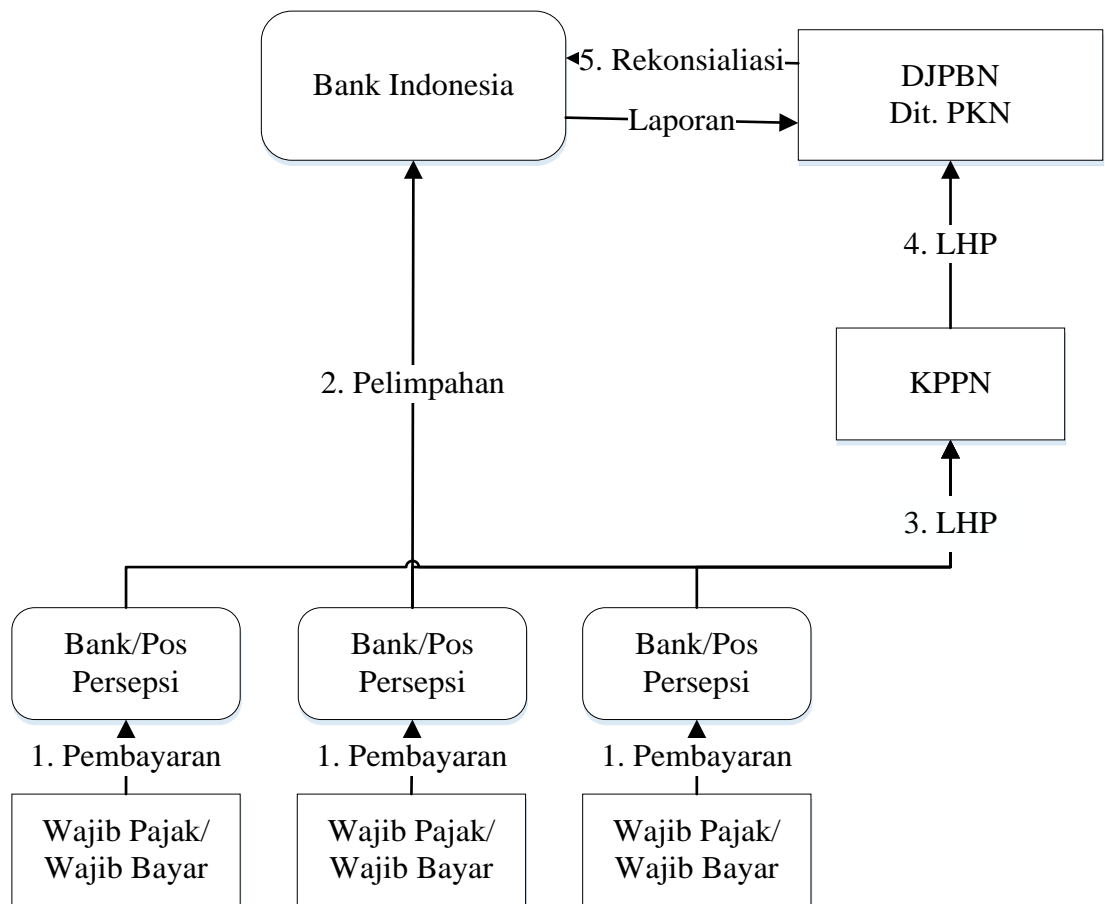
- 4) RPK-BUN-P menerima pengisian dana dari Bank Indonesia pada awal hari kerja.

- 5) BO I menarik dana dari RPK-BUN-P sebesar SP2D dan atau Surat Perintah Transfer.
  - 6) BO II dan Kantor Pos menerima dana dari BO I sesuai dengan SP2D paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelum pembayaran gaji.
  - 7) Kantor Pos membayarkan kepada yang berhak sesuai nilai SP2D.
  - 8) BO I membayarkan kepada yang berhak sesuai nilai SP2D non-gaji.
  - 9) BO II membayarkan kepada yang berhak pada tanggal telah ditentukan..
  - 10) Kantor Pos dan BO II mentransfer atau memindah bukukan saldo rekening BO II ke RPK-BUN-P melalui BO I pada akhir pembayaran Gaji paling lambat pukul 14.00 waktu setempat.
  - 11) BO I memindah bukukan atau menihilkan saldo ke rekening RPK-BUN-P.
  - 12) Rekening Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BO I menyetorkan sisa dana tersebut ke Bank Indonesia.
- e. Mekanisme pelaksanaan *Treasury Single Account* rekening penerimaan

Penerapan *Treasury Single Account* di Indonesia digunakan untuk menampung semua rekening penerimaan selain rekening penerimaan yang menampung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan diterapkannya *Treasury Single Account* rekening penerimaan, mengakibatkan pelimpahan dari rekening penerimaan RKUN menjadi lebih cepat. Pada dasarnya mekanisme pengelolaan penerimaan negara setelah penerapan *Treasury*

*Single Account* rekening penerimaan tidak berbeda dari sebelum berlakunya *Treasury Single Account* rekening penerimaan. Secara umum mekanisme dapat dilihat pada gambar 2.2.

Penjelasan Gambar 2.2 Mekanisme pelaksanaan *Treasury Single Account* rekening penerimaan sebagai berikut:



Gambar 2.2  
Mekanisme Pelaksanaan TSA Rekening Penerimaan

- 1) Wajib Pajak atau Wajib Bayar melakukan pembayaran kewajibannya melalui Bank Pos atau Bank Persepsi.

- 2) Bank Pos atau Bank Persepsi melakukan pelimpahan penerimaan tersebut kepada Bank Indonesia.
  - 3) Setiap Hari bank Pos dan Bank Persepsi menyampaikan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ke KPPN.
  - 4) KPPN kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Direktorat Jendral Perbendaharaan.
  - 5) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia (Direktorat PKN).
- f. Pengukuran *Treasury Single Account* dilihat berdasarkan *Idle Cash*

Abdul Gofar (dalam Setianingias, 2011:36) mengatakan bahwa *Idle Cash* adalah uang yang mengendap atau menganggur pada bank yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan. *Idle Cash* atau uang menganggur merupakan sejumlah dana yang tidak atau belum dimanfaatkan. Hal ini muncul sebagai akibat dari selisih lebih antara penyediaan dana untuk pengeluaran dengan realisasi pengeluaran yang ada pada bank operasional sebagai bank penampung dana pengeluaran dan juga penerimaan pemerintah yang belum dilimpahkan ke rekening kas negara. Sebelum penerapan *Treasury Single Account*, *Idle Cash* pada bank operasional dan bank persepsi sangat tinggi. Pemerintah juga tidak bisa mengoptimalkan untuk mendatangkan keuntungan bagi negara. Hal tersebut dalam perspektif Manajemen Kas yang selama ini berlaku menimbulkan *oppurtunity loss* bagi pemerintah.

Andie Megantara *et al* (dalam Setianingtias, 2011 : 36) menyatakan setiap dana yang dimiliki negara harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang mendukung perekonomian negara. Melalui Manajemen Kas yang baik dana yang tidak memberikan *return* maksimal dapat diinvestasikan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara daripada hanya mengendap pada bank yang menimbulkan terjadinya *Idle Cash*.

Keberhasilan *Treasury Single Account* dapat dilihat dari keadaan atau posisi uang menganggur yang terjadi. *Treasury Single Account* yang terdiri dari dua rekening, yaitu rekening penerimaan dan pengeluaran memberikan perbedaan signifikan terhadap *Idle Cash*. Sebelum adanya *Treasury Single Account* apabila terjadi selisih lebih antara penyediaan dana untuk pengeluaran dengan realisasi pengeluaran akan disimpan di bank yang ditentukan, namun setelah berlakunya *Treasury Single Account* pengeluaran dengan realisasi pengeluaran akan ditransfer ke dalam satu rekening yaitu *Treasury Single Account* dihari yang sama pada bank sentral. Dari keadaan ini jelas bahwa *Treasury Single Account* memberikan perbedaan yang nyata terhadap adanya *Idle Cash*.

## **B. Kerangka Berpikir**

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Manajemen Kas yang optimal adalah dengan menerapkan *Treasury Single Account*. Di mana dalam Manajemen Kas, penerapan *Treasury Single Account* ini memengaruhi Perencanaan Kas (*Forecasting*), penghilangan *Idle Cash* dan pemanfaatan *Idle*

*Cash* sehingga didapatkan Remunerasi guna menciptakan efisiensi pengelolaan uang negara.

Masalah yang dihadapi pemerintah selama ini adalah karena adanya uang yang telah terkumpul menjadi menganggur dan terjadinya pengendapan dana pada bank operasional, sehingga pemerintah tidak dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu pelimpahan penerimaan yang diterima pemerintah membutuhkan waktu yang kurang efektif.

Dengan penerapan *Treasury Single Acnt* diharapkan dapat meminimalisir dana yang menganggur melalui kegiatan Perencanaan Kas dan pemanfaatan dana yang sesuai dan tepat dengan sasaran. Dengan tidak adanya saldo yang menganggur memungkinkan pemerintah mendapatkan penerimaan diterapkannya sistem tersebut menjadikan pemerintah dan mewujudkan *good and clean gocerment*.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana penerapan Manajemen Kas dinilai dari Perencanaan Kas (*forecasting*) dan Remunerasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan *Treasury Single Account* dinilai dari *Idle Cash* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta?
3. Bagaimana penerapan *Treasury Single Account* terhadap Manajemen Kas dinilai dari *Idle Cash* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta?